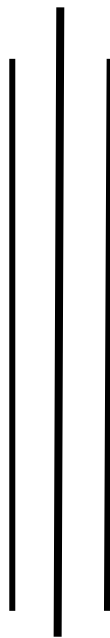




**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya manusia maupun sumberdaya organisasi secara efektif.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Malang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang juga menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta

rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

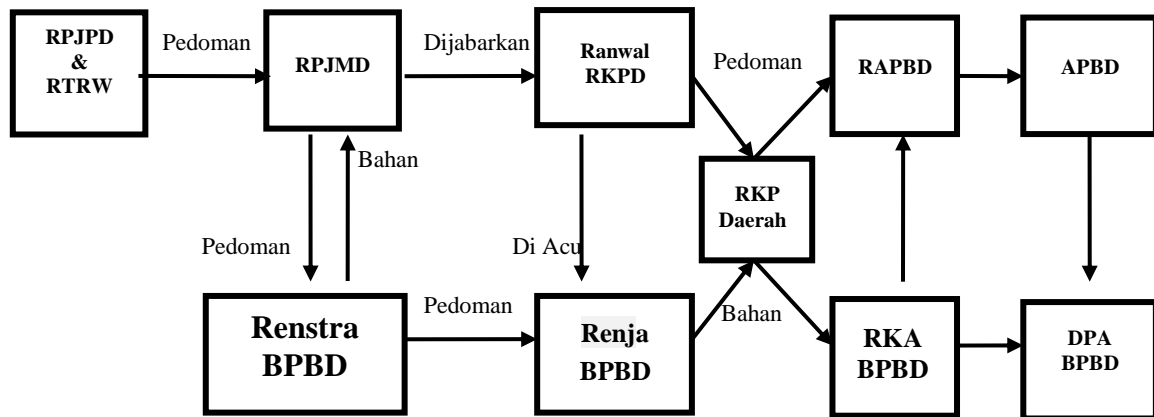
Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 4 (empat) yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Musyawarah Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah

kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malang.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 ini akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2021 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 merupakan rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD tahun 2021 dimana RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan

penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2021 merupakan penjabaran dari RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang terkait dengan Rencana Kerja dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam hal program dan kegiatan yang menyangkut dengan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Program dan kegiatan yang ada pada Rencana Kerja BPBD Kabupaten Malang selaras dengan program dan kegiatan yang ada pada BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan dalam mendukung Misi ke 5 Bupati Malang yaitu, Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif, dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan.

Kegiatan IKK (Indikator kinerja Kegiatan) BPBD terdiri dari 2 (Dua) Program yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Penanggulangan Bencana. Pencapaian IKK BPBD di Tribulan II untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tercapai sebesar 50%, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sudah tercapai sebesar 50%, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tercapai sebesar 0% dikarenakan adanya pemangkasan anggaran, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tercapai sebesar 50%, kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercapai 50%, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercapai 50%. Pencapaian untuk Program Penanggulangan Bencana yang terdiri dari kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang tercapai 26,5% dan kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan capaian 72,7%.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 177 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2021 :

- 1) Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2021 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021;
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
- 4) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2021 :

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana;
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana penanggulangan bencana;
- 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2021;
- 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan
Triwulan II Tahun 2021

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Triwulan II Tahun 2021 sesuai penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan :
 - a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana;
 - b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja bertujuan untuk :

- a. Peningkatan Akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
- b. Umpan Balik Peningkatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
- c. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tercapai sebesar 50%, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sudah tercapai sebesar 50%, kegiatan Adminstrasi Kepegawain Perangkat Daerah yang tercapai sebesar 0% dikarenakan adanya pemangkasan anggaran, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tercapai sebesar 50%, kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tercapai 50%, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tercapai 50%. Pencapaian untuk Program Penanggulangan Bencana yang terdiri dari kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang tercapai 26,5% dan kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan capaian 72,7%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Keterangan
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100	10 = 6+8	11 = 10/5 x 100	12							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					30.094.414.840		12.184.260.411		10.446.483.264		3.090.788.563	71,6	29,59		15.275.048.974	137,2	50,76	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	0%	7.154.798.740	0%	5.132.956.301	0%	4.730.109.564	0%	1.918.239.999	0	40,55	0%	7.051.196.300	0	98,55	
			Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%		100%		0%		0%		0		100%		0		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%		100%		0%		0%		0		100%		0		
			Persentase Penunjang Kerja Aparatur	100%		0%		0%		0%		0		0%		0		
			Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	100%		0%		0%		0%		0		0%		0		

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Keterangan
			Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%		100%		0%		0%		0		100%		0		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0 -	446.202.500	0 -	228.073.600	100 -	2.097.745	50 -	0	50	0	50 -	228.073.600	0	51,11	
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	35 Buku	446.202.500	33 Buku	228.073.600	8 Buku	2.097.745	4 Buku	0	50	0	37 Buku	228.073.600	105,7	51,11	Dokumen RKA, DPA, LKJ PD, DPPA Refocusing
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	0 -	628.743.300	0 -	1.875.664.912	100 -	4.297.168.519	50 -	1.700.423.114	50	39,57	50 -	3.576.088.026	0	568,8	
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN yang Terbayar	0 Bulan	0	0 Bulan	0	14 Bulan	2.966.419.567	8 Bulan	1.086.865.663	57,14	36,64	8 Bulan	1.086.865.663	0	0	
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	344 OB	440.407.000	345 OB	1.778.446.812	47 OB	1.301.948.952	47 OB	599.157.451	100	46,02	345 OB	2.377.604.263	100,3	539,87	
			Jumlah Petugas Kebersihan	16 OB	115.845.600	14 OB	58.800.000	1 OB	28.800.000	1 OB	14.400.000	100	50	14 OB	73.200.000	87,5	63,19	
	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir	5 Buku	35.215.800	4 Buku	18.338.800	1 Buku	0	0 Buku	0	0	0	4 Buku	18.338.800	80	52,08	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Keterangan
	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	5 Buku	37.274.900	4 Buku	20.079.300	1 Buku	0	1 Buku	0	100	0	5 Buku	20.079.300	100	53,87	-
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0 -	346.895.000	0 -	154.113.700	100 -	0	0 -	0	0	0	0 -	154.113.700	0	44,43	
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	240 Stel	249.188.000	193 Stel	122.198.700	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	193 Stel	122.198.700	80,42	49,04	
	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	39 Orang	97.707.000	34 Orang	31.915.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	34 Orang	31.915.000	87,18	32,66	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	0 -	4.534.090.700	0 -	1.867.621.629	100 -	172.948.300	50 -	71.914.100	50	41,58	50 -	1.939.535.729	0	42,78	
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat - Alat Listrik dan Elektronik	147 Jenis	24.840.000	119 Jenis	17.371.600	10 Jenis	6.033.000	7 Jenis	2.944.000	70	48,8	119 Jenis	20.315.600	80,95	81,79	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	1479 Jenis	248.677.900	1609 Jenis	153.384.607	63 Jenis	20.918.200	51 Jenis	13.691.100	80,95	65,45	1609 Jenis	167.075.707	108,8	67,19	-
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 Unit	1.788.020.200	16 Unit	132.614.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	16 Unit	132.614.000	53,33	7,42	
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	3188 Jenis	269.785.600	4694 Jenis	172.871.950	15 Jenis	8.262.100	12 Jenis	6.685.000	80	80,91	4706 Jenis	179.556.950	147,6	66,56	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Keterangan
	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2202 Jenis	43.240.000	2031 Jenis	30.660.000	3 Jenis	7.560.000	3 Jenis	3.843.000	100	50,83	2031 Jenis	34.503.000	92,23	79,79	
	1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	3180 Pack	151.435.000	3693 Pack	91.467.500	530 Pack	17.755.000	130 Pack	4.355.000	24,53	24,53	3823 Pack	95.822.500	120,2	63,28	
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah	557 Orang	1.058.655.000	271 Orang	631.028.736	25 Orang	54.155.000	11 Orang	10.826.000	44	19,99	282 Orang	641.854.736	50,63	60,63	
			Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan ke Dalam Daerah	378 Orang	949.437.000	787 Orang	638.223.236	53 Orang	58.265.000	50 Orang	29.570.000	94,34	50,75	837 Orang	667.793.236	221,4	70,34	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0 -	216.072.840	0 -	122.967.378	100 -	81.575.000	50 -	12.623.285	50	15,47	50 -	135.590.663	0	62,75	
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	12476 Surat	33.480.000	10647 Surat	22.780.000	2625 Surat	875.000	1403 Surat	875.000	53,45	100	12050 Surat	23.655.000	96,59	70,65	
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	180 Rekening	182.592.840	144 Rekening	100.187.378	3 Rekening	80.700.000	3 Rekening	11.748.285	100	14,56	144 Rekening	111.935.663	80	61,3	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0 -	982.794.400	0 -	884.515.082	100 -	176.320.000	50 -	133.279.500	50	75,59	50 -	1.017.794.582	0	103,6	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Keterangan
2	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang di Pelihara Rutin dan Berkala	67 Unit	887.756.400	87 Unit	673.639.582	17 Unit	172.360.000	12 Unit	129.444.500	70,59	75,1	87 Unit	803.084.082	129,9	90,46	
	1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala	55 Jenis	24.451.000	51 Jenis	12.530.000	2 Jenis	980.000	2 Jenis	980.000	100	100	53 Jenis	13.510.000	96,36	55,25	
	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Pelihara Rutin/Berkala	64 Jenis	24.795.000	46 Jenis	165.025.500	11 Jenis	1.105.000	10 Jenis	1.105.000	90,91	100	56 Jenis	166.130.500	87,5	670,02	
	1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	219 Jenis	36.358.000	152 Jenis	26.840.000	1 Jenis	1.450.000	1 Jenis	1.325.000	100	91,38	153 Jenis	28.165.000	69,86	77,47	
				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	23 Unit	9.434.000	18 Unit	6.480.000	1 Unit	425.000	1 Unit	425.000	100	100	19 Unit	6.905.000	82,61	73,19
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	%	22.939.616.100	0%	7.051.304.110	0%	5.716.373.700	0%	1.172.548.564	0	20,51	0%	8.223.852.674	0	35,85	
			Persentase Penanganan Bencana	100%		100%		0%		0%		0		100%		0		
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	85%		83%		0%		0%		0		83%		0		

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Keterangan
			Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	90%		87%		0%		0%		0		87%		0		
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	0 -	21.545.216.100	0 -	6.202.148.042	100 -	5.006.821.800	26,49	852.811.564	26,5	17,03	26,49 -	7.054.959.604	0	32,74	
	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	4 Dokumen	486.654.000	3 Dokumen	297.146.300	2 Dokumen	147.956.000	1 Dokumen	68.891.364	50	46,56	4 Dokumen	366.037.664	100	75,22	
			Jumlah Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	132 Wilayah	374.993.000	101 Wilayah	237.885.450	33 Wilayah	564.386.500	16 Wilayah	18.534.000	48,48	3,28	117 Wilayah	256.419.450	88,64	68,38	
			Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	4 Dokumen	459.870.000	3 Dokumen	247.115.900	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	247.115.900	75	53,74	
			Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	12 Sekolah/Madrasah	434.950.000	1 Sekolah/Madrasah	16.764.200	0 Sekolah/Madrasah	0	0 Sekolah/Madrasah	0	0	0	1 Sekolah/Madrasah	16.764.200	8,33	3,85	
			Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	75 Sekolah	421.920.000	60 Sekolah	27.068.690	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0	0	60 Sekolah	27.068.690	80	6,42	
	1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	7 Dokumen	1.029.596.600	3 Dokumen	385.549.979	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	385.549.979	42,86	37,45	

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Keterangan	
			Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	7 Kegiatan	287.105.000	2 Kegiatan	111.175.500	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	2 Kegiatan	111.175.500	28,57	38,72	
			Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	10 Unit	1.798.020.000	3 Unit	319.723.200	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	3 Unit	319.723.200	30	17,78	
			Jumlah SDM Paham Jitupasna	120 Orang	792.031.500	90 Orang	281.113.300	30 Orang	100.758.000	30 Orang	58.222.000	100	57,78	120 Orang	339.335.300	100	42,84		
			Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	120 Orang	248.919.000	90 Orang	180.057.000	30 Orang	214.740.600	30 Orang	35.693.000	100	16,62	120 Orang	215.750.000	100	86,67		
			Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40 Orang	920.250.000	30 Orang	104.141.000	40 Orang	83.726.000	40 Orang	80.526.000	100	96,18	70 Orang	184.667.000	175	20,07		
	1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	12 Desa	619.215.000	9 Desa	404.250.900	3 Desa	193.322.000	0 Desa	0	0	0	9 Desa	404.250.900	75	65,28		
			Jumlah Mitigasi Struktural yang Dilaksanakan	150 Meter	535.465.000	100 Meter	241.070.400	0 Meter	4.613.000	0 Meter	0	0	0	100 Meter	241.070.400	66,67	45,02		
			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	525 Paket	828.545.000	266 Paket	303.738.000	50 Paket	189.657.000	0 Paket	0	0	0	266 Paket	303.738.000	50,67	36,66		
			Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Picket Kesiapsiagaan Bencana	160 Orang	1.334.304.000	365 Orang	370.012.600	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	365 Orang	370.012.600	228,1	27,73		

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Keterangan	
				Unit	Anggaran	Unit	Anggaran	Unit	Anggaran	Unit	Anggaran	Unit	Anggaran	Unit	Anggaran	Unit	Anggaran		
			Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (POSDALOPS) yang Dibentuk	1 Unit	900.000.000	1 Unit	339.053.600	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	1 Unit	339.053.600	100	37,67	
	1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Penanganan Kedaruratan	204 Kali	8.373.936.500	185 Kali	1.760.575.105	71 Kali	3.507.662.700	44 Kali	590.945.200	61,97	16,85	229 Kali	2.351.520.305	112,3	28,08		
			Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	173 Orang	490.241.500	113 Orang	218.603.300	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	113 Orang	218.603.300	65,32	44,59		
			Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang Dibentuk	1 Tim	1.209.200.000	1 Tim	357.103.618	0 Tim	0	0 Tim	0	0	0	1 Tim	357.103.618	100	29,53	-	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	0 -	1.394.400.000	0 -	849.156.068	100 -	709.551.900	72.66 -	319.737.000	72,7	45,06	72.66 -	1.168.893.068	0	83,83		
	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	1600 Paket	697.200.000	1600 Paket	676.479.868	600 Paket	709.551.900	600 Paket	319.737.000	100	45,06	2200 Paket	996.216.868	137,5	142,89	Pembelian 750 lembar Bronjong dan 600 Paket Sembako	
			Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	200 Orang	697.200.000	110 Orang	172.676.200	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	110 Orang	172.676.200	55	24,77	-	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dilakukan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Malang dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat dengan terbentuknya Desa Tangguh Bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

B. Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan :

1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana;
 - 1.1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - 1) Jumlah Mitigasi non struktural yang dilaksanakan
 - Penyusunan Dokumen Pra Bencana sebagai pedoman maupun acuan kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam dan non alam di wilayah kabupaten Malang antara lain :
 - a. Review Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Alam dan Non Alam;
 - b. Dokumen renkon longsor dengan penanganan secara protokol kesehatan
 - c. RPB dengan penanganan secara protokol kesehatan
 - 2) Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
 - Penyebaran informasi berupa pamflet, baner dan quisioner bencana alam dan non alam di wilayah pemerintah Kabupaten Malang
 - 1.2 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 - 1) Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi
 - Melakukan sosialisasi psikososial pasca bencana untuk anak sekolah dan warga korban bencana

1.3 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1) Jumlah desa tangguh bencana

- Pembentukan forum pengurangan resiko bencana di setiap desa rawan bencana

2) Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana

- Pengadaan rambu-rambu rawan bencana di daerah rawan bencana

1.4 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

1) Jumlah penanganan kedaruratan

- Penanganan bencana alam dan non alam dengan uraian penanganan bencana alam (pembentukan tim pencegahan penyebarluasan epidemi virus covid-19) sebagai berikut :
 - a. Tim Spraying;
 - b. Tim Pemakaman;
 - c. Tim Check Point;
 - d. Tim Strong point.

2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

2.1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota

1) Jumlah ketersediaan barang logistik dan kebencanaan

- Menyediaan kebutuhan logistik penanggulangan bencana berupa sembako dan bronjong.

Uraian lebih lanjut Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KUNERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-5)	9	10	11
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)		5,278,150,997		4.730.109.564	(548.041.433)	Kab. Malang		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu		95,042,788		2.097.745	(92.945.043)	Kab. Malang		
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP/Profil Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	8 Buku	95,042,788	8 Buku	2.097.745	(92.945.043)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu		4,252,575,009		4.297.168.519	44.593.510	Kab. Malang		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KUNERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	14 Bulan	2,914,172,757	14 Bulan	2.966.419.567	52.246.810	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	47 OB	1,330,748,952	47 OB	1.301.948.952	(28.800.000)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
		Jumlah Petugas Kebersihan	1 OB		1 OB	28.800.000	28.800.000	Kab. Malang		
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Buku	4,477,300	1 Buku	0	(4.477.300)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	1 Buku	3,176,000	1 Buku	0	(3.176.000)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.05.01.2.05	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		75,854,000		0	(75.854.000)	Kab. Malang		
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	80 Stel	63,854,000	0 Stel	0	(63.854.000)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KUNERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	20 Orang	12,000,000	1 Buku	0	(4.477.300)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		448,447,200	1 Buku	0	(3.176.000)	Kab. Malang		
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	7 Jenis	6,033,000		0	(75.854.000)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	51 Jenis	141,257,700	63 Jenis	20.918.200	(120.339.500)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Unit		0 Unit	0	-			
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan disediakan	15 Jenis	47,684,500	15 Jenis	8.262.100	(39.422.400)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KUNERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis	7,560,000	3 Jenis	7.560.000	-	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	1060 Pack	35,510,000	530 Pack	17.755.000	(17.755.000)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah	34 Orang	210,402,000	25 Orang	54.155.000	(156.247.000)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
		Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan ke Dalam Daerah	53 Orang		53 Orang	58.265.000	58.265.000			
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		88,200,000		81.575.000	(6.625.000)	Kab. Malang		
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	2625 Surat	7,500,000	2625 Surat	875.000	(6.625.000)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	3 Rekening	80,700,000	3 Rekening	80.700.000	-	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KUNERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar		318,032,000		176.320.000	(141.712.000)	Kab. Malang		
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara Rutin dan Berkala	17 Unit	297,220,000	17 Unit	172.360.000	(124.860.000)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara Rutin/Berkala	3 jenis	6,090,000	2 Jenis	980.000	(5.110.000)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala dipelihara	14 Jenis	4,882,000	11 Jenis	1.105.000	(3.777.000)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	1 Jenis	9,840,000	1 Jenis	1.450.000	(8.390.000)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	5 Unit		1 Unit	425.000	425.000			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KUNERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu		3,577,754,400		5.716.373.700	2.138.619.300	Kab. Malang		
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana		2,950,777,400		5.006.821.800	2.056.044.400	Kab. Malang		
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Mitigasi Non Struktural yang dilaksanakan	1 Dokumen	396,173,500	2 Dokumen	147.956.000	(248.217.500)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DBH CHT	
		Jumlah Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	33 Wilayah		33 Wilayah	564.386.500	564.386.500			Refocusing
		Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	1 Dokumen		0 Dokumen	0	-			Refocusing
		Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	2 Sekolah/Madrasah		0 Sekolah/Madrasah	0	-			
		Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA Sekolah)	16 Sekolah		0 Sekolah	0	-			
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi	2 Dokumen	640,132,000	0 Dokumen	0	(640.132.000)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
		Jumlah Pemulihan	2 Kegiatan		0 Kegiatan	0	-			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KUNERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
		Rehabilitasi Pasca Bencana								
		Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	3 Unit		0 Unit	0	-			
		Jumlah SDM paham JITUPASNA	30 Orang		30 Orang	100.758.000	100.758.000			
		Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	30 Orang		30 Orang	214.740.600	214.740.600			PEN
		Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40 Orang		40 Orang	83.726.000	83.726.000			
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa	495,435,500	3 Desa	193.322.000	(302.113.500)	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PEN dan PUG
		Jumlah Mitigasi Struktural yang dilaksanakan	50 Meter		0 Meter	4.613.000	4.613.000			
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	50 Buah		50 Paket	189.657.000	189.657.000			PEN
		Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Piket Kesiapsiagaan Bencana	40 Orang		0 Orang	0	-			
		Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) yang dibentuk	1 Unit		0 Unit	0	-			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KUNERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Penanganan Kedaruratan	71 Kali	1,419,036,400	71 Kali	3.507.662.700	2.088.626.300	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DBH CHT	Refocusing
		Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	40 Orang		0 Orang	0	-			
		Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk	1 Tim		0 Tim	0	-			
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan darurat / pemulihan awal akibat bencana.		626,977,000		709.551.900	82.574.900	Kab. Malang		
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	600 Paket	626,977,000	600 Paket	709.551.900	82.574.900	Kab. Malang	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DBH CHT	PEN
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	50 Orang		0 Orang	0	-			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang.

Untuk mempercepat dan penyelarasan kegiatan nasional perlu ada perubahan target kinerja dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan non alam dengan melakukan upaya-upaya efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya target kinerja Rencana Kerja Tahun 2021.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan pemenuhan target kinerja pembangunan daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

SANUSI